

## **Faktor Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia: Studi Literatur Laporan Data Kemiskinan BPS Tahun 2022**

**Tomi Agus Triono<sup>1</sup>, Reno Candra Sangaji<sup>1</sup>**

(1) Doktoral Program, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Islam Indonesia,  
Email Korespondensi: Tomiagustriono87@gmail.com

***Abstrak:** The difference in the level of missiles in each region cannot be generalized in handling them, the government needs several stages to achieve the desired goal and immediately eradicate missiles in Indonesia. The purpose of this study is to determine the factors of emphasis on poverty levels in Indonesia. In this article using a qualitative descriptive approach, using BPS data for 2022, this article displays the results that the country of Indonesia is very broad with areas that will become resources in each place causing differences in poverty levels, poverty rates in one area differ from the level poverty in other areas this is because the level of people's purchasing power is not evenly distributed. Then the factors of economic growth and social assistance that are channeled properly make people's purchasing power and economic growth increase.*

***Keywords:** Poverty rate, poverty line, per capita income,*

**Abstract:** Perbedaan tingkat kemiskinan pada setiap daerah tidak bisa di samaratakan dalam penanganannya, pemerintah memerlukan beberapa tahapan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan segera mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui factor penekanan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Dalam artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data BPS tahun 2022, artikel ini menampilkan hasil bahwa negara Indonesia yang sangat luas dengan daerah yang akan sumber daya di masing masing tempat menyebabkan perbedaan tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan di daerah satu berbeda dengan tingkat kemiskinan di daerah lain hal ini dikarenakan tingkat daya beli masyarakat belum merata. Kemudian factor pertumbuhan ekonomi serta bantuan sosial yang tersalurkan dengan tepat membuat daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi meningkat.

**Kata kunci:** Tingkat Kemiskinan, garis kemiskinan, pendapatan perkapita,

**Article Information:** Submitted: 2022-11-15; Revised 2022-12-17; Accepted: 2023-01-15

### **PENDAHULUAN**

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 mencapai 26,36 juta orang, perkembangan tingkat kemiskinan diklaim menurun setelah dilakukan pendataan ulang oleh BPS per Maret 2022 dengan tingkat kemiskinan menjadi 9,54 persen menurun 0,17 persen poin terhadap September 2021 dan menurun 0,60 persen poin terhadap Maret 2021. Namun menurut BPS per September 2022 tingkat kemiskinan kembali naik 0,03 persen terhadap maret 2022 menjadi 9,57 persen. Kendati demikian tingkat kemiskinan di Indonesia menurun dilihat dari tahun sebelumnya [1].

Tingkat kemiskinan Indonesia yang diklaim menurun dari periode 2011 hingga 2022, justru naik menurut Bank Dunia dari 54 Juta Penduduk menjadi 67 Juta penduduk miskin. Sebanyak 13 juta penduduk saat ini berubah setatus menjadi golongan miskin. Hal ini dikarenakan bank dunia menaikkan standar kemiskinanya jauh di atas standar kemiskinan



Indonesia, Dalam laporan ‘*East Asia and The Pacific Economic Update October 2022*’, Bank Dunia (World Bank) mengubah batas garis kemiskinan. Basis perhitungan terbaru mengacu pada paritas daya beli (PPP) 2017. Indonesia saat ini menghuni 100 besar negara miskin di Dunia, sedangkan menurut World Population Review (WPR) Indonesia menempati urutan ke 73 sebagai negara termiskin di Dunia.

Pada dasarnya Kemiskinan menjadi salah satu penghambat sulitnya suatu daerah/negara untuk maju. Kemiskinan menyebabkan menurunnya kualitas sumberdaya manusia, akibat ketidak mampuan mengakses pendidikan, kesehatan, nutrisi yang baik yang berimbas pada produktivitas yang melemah. [2] berpendapat terdapat lima alasan mengapa kebijakan harus berfokus pada penurunan kemiskinan, *pertama*: kemiskinan yang tinggi akan menciptakan masyarakat sulit mendapatkan pinjaman, tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka; *kedua*, orang kaya yang jatuh miskin umumnya tidak menghemat, tidak menabung dan tidak investasi; *ketiga*, tingkat pendapatan dan standar hidup rendah berdampak pada buruknya kesehatan, nutrisi dan menurunkan produktivitas; *keempat*, meningkatnya pendapatan penduduk miskin merangsang pertumbuhan produk lokal untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan teraknirpengurangan kemiskinan dapat mendorong perluasan perekonomian yang sehat. Melihat fenomena diatas pemerintah saat ini harus bertindak untuk segera mengentaskan kemiskinan dengan serius, dan bukan hanya setatus.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menekankan kepada fenomena yang terjadi dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengambilan data menggunakan data sekunder dari survey BPS tahun 2011 hingga tahun 2022.

## **KRITERIA KEMISKINAN**

1. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan.
2. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.
3. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
4. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan.



5. Garis Kemiskinan per rumah tangga dihitung dari garis kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin.
6. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
7. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan Maret 2022 adalah data Susenas Konsumsi dan Pengeluaran bulan Maret 2022.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Jumlah dan presentase penduduk miskin menurut daerah

Dibawah ini merupakan table data penduduk miskin di daerah, dan dinyatakan bahwa dari maret 2021 hingga maret 2022 angka kemiskinan menurut daerah tampak turun,

**Tabel 1. Penduduk miskin berdasarkan daerah**

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
<b>Perkotaan</b>		
Maret 2021	12,18	7,89
September 2021	11,86	7,60
Maret 2022	11,82	7,50
<b>Perdesaan</b>		
Maret 2021	15,37	13,10
September 2021	14,64	12,53
Maret 2022	14,34	12,29
<b>Total</b>		
Maret 2021	27,54	10,14
September 2021	26,50	9,71
Maret 2022	26,16	9,54

*Sumber: Data sekunder BPS 2022*

### Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau

Tabel dibawah merupakan hasil survey yang dilakukan oleh BPS berdasarkan pulau, terdapat hasil tingkat kemiskinan paling tinggi berada di pulau maluku dan papua, sedangkan tingkat kemiskinan paling rendah berada di pulau Kalimantan. Namun berdasarkan dengan jumlahnya, pulau dengan penduduk termiskin terbanyak adalah terdapat pada pulau jawa dengan total 13,85 jiwa. Hal ini membuktikan tingkat kemiskinan tertinggi di papua dan maluku tetapi jumlah penduduknya masih di miliki oleh pulau jawa. Sedangkan jumlah penduduk miskin paling rendah masih berada di Kalimantan dengan total penduduk miskin hanya 0,98 juta jiwa.



**Tabel 2. Jumlah penduduk miskin menurut pulau**

Pulau	Persentase Penduduk Miskin (%)			Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera	8,28	10,46	9,49	2,24	3,50	5,74
Jawa	7,63	11,90	9,01	7,93	5,92	13,85
Bali dan Nusa Tenggara	8,77	17,48	13,35	0,65	1,42	2,07
Kalimantan	4,52	7,08	5,82	0,37	0,61	0,98
Sulawesi	5,88	12,93	10,02	0,49	1,52	2,01
Maluku dan Papua	5,60	27,22	19,89	0,14	1,37	1,51
Indonesia	7,50	12,29	9,54	11,82	14,34	26,16

*Sumber: data sekunder BPS 2022*

### Garis Kemiskinan rumah tangga miskin

Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata-rata, garis kemiskinan per rumah tangga pada Maret 2022 adalah sebesar Rp2.395.923,00/bulan naik sebesar 9,52 persen dibanding kondisi September 2021 yang sebesar Rp2.187.756,00/bulan. Disamping itu garis kemiskinan per kapita juga naik dari sebelumnya Rp. 486.168/Bulan naik sebesar 3,97 persen menjadi 505.469/Bulan.

**Tabel 3. Garis Kemiskinan Ruamah Tangga**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Miskin	Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin (Rp/rumah tangga/bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)
September 2021	486.168	4,50	2.187.756
Maret 2022	505.469	4,74	2.395.923
Perubahan September 2021-Maret 2022 (%)	3,97	5,33	9,52

*Sumber: Data sekunder BPS 2022*

### Indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Table 4. berisi tentang indek kedalaman kemiskinan dan indek keparahan kemiskinan, berdasarkan tepat tinggalnya, perkotaan dan pedesaan, masing-masing mengalami penurunan hingga maret 2022.



**Tabel 4. Indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan**

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Indeks Kedalaman Kemiskinan (<math>P_1</math>)</b>			
Maret 2021	1,294	2,266	1,714
September 2021	1,229	2,253	1,668
Maret 2022	1,187	2,125	1,586
<b>Indeks Keparahannya Kemiskinan (<math>P_2</math>)</b>			
Maret 2021	0,314	0,569	0,424
September 2021	0,291	0,587	0,418
Maret 2022	0,286	0,542	0,395

Sumber: Data sekunder BPS 2022

Kemudian seperti yang tertera di dalam table indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, untuk indeks kedalaman kemiskinan di pedesaan menacapai 2,125 dan begitupula indeks keparahan kemiskinan di pedesaan mencapai 0,542.

### Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi

**Tabel 4. Jumlah penduduk miskin berdasarkan provinsi**

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)					
	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	Sep'21	Mar'22	Sep'21	Mar'22	Sep'21	Mar'22
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Aceh	195.47	193.32	654.79	613.49	850.26	806.82
2. Sumatera Utara	725.04	739.86	548.03	528.33	1.273.07	1.268.19
3. Sumatera Barat	134.53	137.61	205.39	197.60	339.93	335.21
4. Riau	190.99	181.82	305.67	303.21	496.66	485.03
5. Jambi	126.10	127.34	153.75	152.03	279.86	279.37
6. Sumatera Selatan	393.38	371.50	723.23	673.18	1.116.61	1.044.69
7. Bengkulu	98.83	100.69	192.97	196.54	291.79	297.23
8. Lampung	236.48	234.78	770.54	767.63	1.007.02	1.002.41
9. Kep. Bangka Belitung	27.28	26.48	42.43	40.30	69.70	66.78
10. Kepulauan Riau	119.31	122.60	18.44	29.08	137.75	151.68
11. DKI Jakarta	498.29	502.04	-	-	498.29	502.04
12. Jawa Barat	2.951.07	3.010.36	1.053.79	1.060.63	4.004.86	4.070.98
13. Jawa Tengah	1.847.09	1.818.25	2.086.92	2.013.20	3.934.01	3.831.44
14. DI Yogyakarta	331.71	315.46	142.78	139.30	474.49	454.76
15. Jawa Timur	1.768.91	1.721.46	2.490.69	2.459.83	4.259.60	4.181.29
16. Banten	576.62	566.49	275.66	247.54	852.28	814.02
17. Bali	137.60	136.06	73.86	69.62	211.46	205.68
18. Nusa Tenggara Barat	387.67	381.84	347.64	350.09	735.30	731.94
19. Nusa Tenggara Timur	120.58	126.80	1.025.70	1.004.83	1.146.28	1.131.62
20. Kalimantan Barat	89.04	85.04	264.96	265.21	354.00	350.25
21. Kalimantan Tengah	57.86	59.84	83.17	85.26	141.03	145.10
22. Kalimantan Selatan	80.35	77.77	117.41	117.93	197.76	195.70
23. Kalimantan Timur	121.28	123.59	111.85	112.66	233.13	236.25
24. Kalimantan Utara	23.88	26.55	25.61	22.91	49.49	49.46
25. Sulawesi Utara	70.14	70.42	116.41	114.72	186.55	185.14
26. Sulawesi Tengah	86.67	90.26	294.54	298.09	381.21	388.35
27. Sulawesi Selatan	198.84	208.53	566.62	568.91	765.46	777.44
28. Sulawesi Tenggara	71.02	69.94	252.25	239.85	323.26	309.79
29. Gorontalo	21.51	21.01	163.09	164.43	184.60	185.44
30. Sulawesi Barat	27.72	27.99	138.27	137.73	165.99	165.72
31. Maluku	49.02	45.12	245.94	245.45	294.97	290.57
32. Maluku Utara	17.60	19.09	63.58	60.79	81.18	79.87
33. Papua Barat	28.19	29.47	193.10	189.31	221.29	218.78
34. Papua	49.23	50.67	895.26	871.46	944.49	922.12
<b>Indonesia</b>	<b>11.859.34</b>	<b>11.820.06</b>	<b>14.644.30</b>	<b>14.341.10</b>	<b>26.503.65</b>	<b>26.161.16</b>

Sumber: Data sekunder BPS 2022



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Mengacu kepada tabel 4 menunjukkan banyaknya jumlah penduduk miskin di setiap provinsi. Penduduk miskin terbanyak ada di provinsi Jawa Timur dengan jumlah sebanyak 4.181.290 jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin paling sedikit adalah Kalimantan utara dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 49.460 jiwa. Jumlah kemiskinan di setiap daerah cenderung turun dari periode sebelumnya, tetapi ada beberapa provinsi yang mengalami kenaikan pada jumlah penduduk miskin diantaranya adalah Kepulauan Riau, DKI, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo.

## Garis Kemiskinan per Kapita menurut provinsi dan daerah.

**Tabel 6. Garis Kemiskinan per kapita Berdasarkan Provinsi**

Provinsi	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)					
	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	Sep'21	Mar'22	Sep'21	Mar'22	Sep'21	Mar'22
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Aceh	577.270	606.394	541.000	565.762	552.939	579.227
2. Sumatera Utara	556.437	583.221	513.987	534.184	537.310	561.004
3. Sumatera Barat	592.302	622.579	566.224	598.431	579.545	610.941
4. Riau	618.552	642.008	564.900	582.224	586.062	605.912
5. Jambi	598.178	635.708	479.006	503.811	517.722	545.870
6. Sumatera Selatan	491.658	515.925	446.678	467.139	463.251	485.069
7. Bengkulu	624.573	647.836	548.327	565.952	572.455	590.754
8. Lampung	535.133	560.467	472.918	492.623	492.620	514.039
9. Kep. Bangka Belitung	753.768	784.988	791.146	820.543	770.457	801.437
10. Kepulauan Riau	655.506	687.245	626.811	659.308	653.853	684.070
11. DKI Jakarta	715.052	738.955	-	-	715.052	738.955
12. Jawa Barat	438.642	452.653	433.041	451.305	437.604	452.580
13. Jawa Tengah	427.099	442.479	419.064	434.785	423.264	438.833
14. DI Yogyakarta	517.353	543.821	438.412	455.583	496.904	521.673
15. Jawa Timur	459.440	473.017	428.457	446.375	445.139	460.909
16. Banten	567.000	587.768	497.213	521.311	547.483	570.368
17. Bali	474.322	499.572	429.877	449.697	461.532	485.022
18. Nusa Tenggara Barat	452.855	470.431	430.381	448.965	441.711	459.826
19. Nusa Tenggara Timur	531.194	558.741	408.769	429.079	437.606	460.823
20. Kalimantan Barat	540.474	558.787	486.544	500.049	505.228	520.660
21. Kalimantan Tengah	499.553	525.228	537.135	565.361	522.879	548.816
22. Kalimantan Selatan	536.041	560.053	517.293	544.795	527.045	553.073
23. Kalimantan Timur	706.886	732.195	692.910	718.550	703.223	728.208
24. Kalimantan Utara	761.840	804.517	684.582	719.982	730.342	772.914
25. Sulawesi Utara	423.427	433.470	411.450	419.589	417.930	427.016
26. Sulawesi Tengah	516.374	538.018	500.351	525.665	505.608	530.251
27. Sulawesi Selatan	403.751	419.172	368.465	383.414	384.455	399.755
28. Sulawesi Tenggara	410.332	420.442	385.845	394.734	394.744	404.137
29. Gorontalo	401.219	413.279	398.806	410.188	400.504	411.906
30. Sulawesi Barat	382.292	404.705	384.598	405.377	384.084	405.187
31. Maluku	613.316	639.349	600.344	625.202	605.909	631.326
32. Maluku Utara	533.231	541.972	494.997	503.388	505.432	514.383
33. Papua Barat	683.148	700.168	629.885	641.565	652.521	665.604
34. Papua	643.071	676.775	582.157	608.205	600.795	629.175
Indonesia	502.730	521.494	464.474	484.209	486.168	505.469

Sumber: Data Sekunder BPS 2022

Pendapatan perkapita daerah menjadi indikator garis kemiskinan suatu daerah, berdasarkan tabel dibawah ini menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan perkapita di Provinsi seluruh Indonesia. Sebagian besar provinsi mengalami kenaikan terhadap pendapatan perkapitanya. Pendapatan perkapita sebagai indikator garis kemiskinan tertinggi terdapat di provinsi Kep. Bangka Belitung dengan jumlah sebesar Rp. 801.437/Bulan. Sedangkan pendapatan perkapita terendah untuk garis kemiskinan terdapat di provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 399.755/Bulan. Tolak ukur pendapatan perkapita di berbagai provinsi di Indonesia memiliki rata rata sebesar Rp. 505.469/Bulan. Hal ini yang menyebabkan Indonesia menempati 100 besar negara termiskin di Dunia, karena garis



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

kemiskinan negara Indonesia terpaut sangat jauh dari Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh bank Dunia.

### Garis Kemiskinan Perkapita Rumah Tangga Miskin Menurut Provinsi dan Daerah

Mengacu pada data tabel diatas merupakan data pendapatan perkapita rumah tangga sebagai tolak ukur garis kemiskinan, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara menjadai provinsi yang memiliki garis kemiskinan perkapita rumah tangga tertinggi dengan jumlah Rp. 4.506.089/Bulan. Sedangkan provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi yang memiliki garis kemiskinan rumah tangga sebesar Rp. 1.952.807/Bulan. Dari data yang disajikan, sebagian besar provinsi mengalami kenaikan pendapatan perkapita rumah tangga sebagi garis kemiskinan.

**Tabel 7. Garis Kemiskinan Per Kapita RT Miskin**

	Provinsi	September 2021			Maret 2022		
		GK per Kapita	Rata-Rata Jumlah ART pada RT Miskin	GK per RT Miskin	GK per Kapita	Rata-Rata Jumlah ART pada RT Miskin	GK per RT Miskin
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Aceh	552.939	5,04	2.786.813	579.227	5,05	2.925.096
2.	Sumatera Utara	537.310	5,20	2.794.012	561.004	5,43	3.046.252
3.	Sumatera Barat	579.545	4,83	2.799.202	610.941	5,41	3.305.191
4.	Riau	586.062	5,33	3.123.710	605.912	5,16	3.126.506
5.	Jambi	517.722	4,27	2.210.673	545.870	4,75	2.592.883
6.	Sumatera Selatan	463.251	4,64	2.149.485	485.069	4,94	2.396.241
7.	Bengkulu	572.455	4,28	2.450.107	590.754	4,50	2.658.393
8.	Lampung	492.620	4,43	2.182.307	514.039	4,56	2.344.018
9.	Kep. Bangka Belitung	770.457	4,74	3.651.966	801.437	4,55	3.646.538
10.	Kepulauan Riau	653.853	4,24	2.772.337	684.070	5,23	3.577.686
11.	DKI Jakarta	715.052	4,79	3.425.099	738.955	4,65	3.436.141
12.	Jawa Barat	437.604	4,16	1.820.433	452.580	4,41	1.995.878
13.	Jawa Tengah	423.264	4,21	1.781.941	438.833	4,45	1.952.807
14.	DI Yogyakarta	496.904	4,15	2.062.152	521.673	4,29	2.237.977
15.	Jawa Timur	445.139	4,14	1.842.875	460.909	4,35	2.004.954
16.	Banten	547.483	4,89	2.677.192	570.368	4,86	2.771.988
17.	Bali	461.532	4,90	2.261.507	485.022	5,07	2.459.062
18.	Nusa Tenggara Barat	441.711	3,70	1.634.331	459.826	4,27	1.963.457
19.	Nusa Tenggara Timur	437.606	5,38	2.354.320	460.823	5,96	2.746.505
20.	Kalimantan Barat	505.228	5,12	2.586.767	520.660	5,23	2.723.052
21.	Kalimantan Tengah	522.879	4,87	2.546.421	548.816	4,85	2.661.758
22.	Kalimantan Selatan	527.045	4,66	2.456.030	553.073	4,83	2.671.343
23.	Kalimantan Timur	703.223	4,82	3.389.535	728.208	5,32	3.874.067
24.	Kalimantan Utara	730.342	5,78	4.221.377	772.914	5,83	4.506.089
25.	Sulawesi Utara	417.930	5,22	2.181.595	427.016	5,13	2.190.592
26.	Sulawesi Tengah	505.608	5,01	2.533.096	530.251	5,41	2.868.658
27.	Sulawesi Selatan	384.455	4,79	1.841.539	399.755	5,41	2.162.675
28.	Sulawesi Tenggara	394.744	5,48	2.163.197	404.137	5,66	2.287.415
29.	Gorontalo	400.504	5,09	2.038.565	411.906	5,07	2.088.363
30.	Sulawesi Barat	384.084	4,92	1.889.693	405.187	5,05	2.046.194
31.	Maluku	605.909	6,23	3.774.813	631.326	6,31	3.983.667
32.	Maluku Utara	505.432	5,26	2.658.572	514.383	6,26	3.220.038
33.	Papua Barat	652.521	4,99	3.256.080	665.604	5,86	3.900.439
34.	Papua	600.795	4,97	2.985.951	629.175	5,01	3.152.167
	Indonesia	486.168	4,50	2.187.756	505.469	4,74	2.395.923

Sumber: Data Sekunder BPS 2022

### Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode September 2021–Maret 2022 antara lain adalah:



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

1. Perekonomian triwulan I/2022 tumbuh sebesar 5,01 persen (y-o-y) atau lebih tinggi daripada triwulan III/2021 (3,15 persen).
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2022 sebesar 5,83 persen atau turun sebesar 0,66 persen poin dibandingkan Agustus 2021 (6,49 persen).
3. Pada Februari 2022 sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 3,51 juta orang lebih banyak dibanding Agustus 2021.
4. Inflasi inti yang menguat pada periode Januari–Maret 2022 mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat terus membaik.
5. Pada Maret 2022 terjadi panen raya dan produksi padi nasional meningkat sebesar 5,02 juta ton dibanding September 2021.
6. Persentase penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap I Maret 2022 sebesar 97,2 persen, meningkat dibandingkan September 2021 sebesar 96,8 persen.
7. Persentase penyaluran bantuan sosial Sembako Januari–Maret 2022 sebesar 98 persen, meningkat dibandingkan Juli–September 2021 yang sebesar 89 persen.
8. Realisasi Anggaran Perlindungan Sosial hingga Maret 2022 mencapai Rp81 Triliun, dimana Rp77,9 Triliun melalui belanja pemerintah pusat, sementara Rp3,1 triliun melalui transfer ke daerah berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

## **KESIMPULAN**

Tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yang seakan menjadi angin segar bagi pemerintah Indonesia, namun pada kenyataannya justru dalam Bank Dunia Indonesia dinyatakan sebagai 100 besar negara termiskin menempati urutan ke 73. Sebelum jauh melangkah untuk meninggalkan negara prediakat sebagai 100 besar negara termiskin di Dunia, Bukti dari data yang dikeluarkan oleh pihak Badan Pusat Statistik Negara Indonesia menjelaskan sedikit demi sedikit Indonesia mencoba untuk bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya Pada Februari 2022 sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 3,51 juta orang lebih banyak dibanding Agustus 2021. Inflasi inti yang menguat pada periode Januari–Maret 2022 mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat terus membaik, Pada Maret 2022 terjadi panen raya dan produksi padi nasional meningkat sebesar 5,02 juta ton dibanding September 2021. Persentase penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap I Maret 2022 sebesar 97,2 persen, meningkat dibandingkan September 2021 sebesar 96,8 persen. Persentase penyaluran bantuan sosial Sembako Januari–Maret 2022 sebesar 98 persen, meningkat dibandingkan Juli–September 2021 yang sebesar 89 persen. Realisasi Anggaran Perlindungan Sosial hingga Maret 2022 mencapai Rp81 Triliun, dimana Rp77,9 Triliun melalui belanja pemerintah pusat, sementara Rp3,1 triliun melalui transfer ke daerah berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

## **Reference**

- [1] Dr. N. Midayanti, “Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2022,” *Badan Pus. Stat.*, no. 51, pp. 1–16, 2022.



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



- [2] P. K. Smith *et al.*, “Effects of C5 complement inhibitor pexelizumab on outcome in high-risk coronary artery bypass grafting: combined results from the PRIMO-CABG I and II trials,” *J. Thorac. Cardiovasc. Surg.*, vol. 142, no. 1, pp. 89–98, 2011.



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.